



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FICKRY MARTAWISUDA**
2. Jabatan : **SENIOR PROJECT MANAGER**
3. NHK : **279385**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 8.942.800.000

1. Tanah Seluas 1063 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/75 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2383 m2/300 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.429.800.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/80 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 864.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/30 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 144.000.000
6. Tanah Seluas 2754 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 826.200.000
7. Tanah Seluas 436 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 130.800.000
8. Tanah Seluas 3081 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
9. Tanah Seluas 1655 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.648.000.000
10. Tanah Seluas 498 m2 di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 525.000.000



1. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
490.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 65.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 246.204.071

F. HARTA LAINNYA Rp. 450.124.867

Sub Total Rp. 10.229.128.938

III. HUTANG Rp. 3.326.875.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.902.253.938

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.